

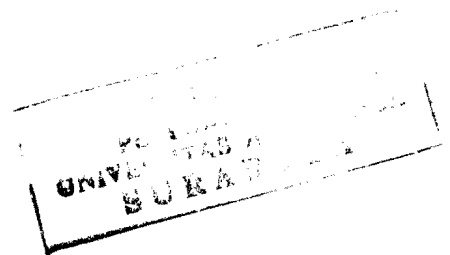
1. BANKS AND BANKING CENTRAL - LAW AND LEGISLATION/KIK
2. BANK INVESTMENTS

Per 65/00
aji
f

SKRIPSI

ANDRIO HIWAWAN WAHYU AJI

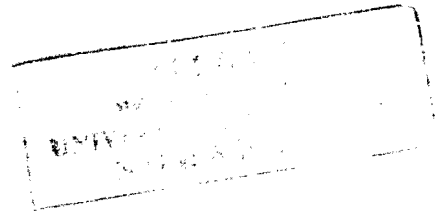
**FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK
SENTRAL TERHADAP KEBERADAAN BANK
CAMPURAN DI INDONESIA SERTA
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK
SENTRAL TERHADAP KEBERADAAN BANK
CAMPURAN DI INDONESIA SERTA
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

SKRIPSI



**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MELENGKAPI TUGAS
GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI STRATA-1
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,

Andrio Himawan Wahyu Aji
NIM. 039614335

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal, 4 Agustus 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

2. Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

4. Y. Sogar Simamora, S.H. M.Hum.



The image shows four handwritten signatures, each on a separate line, corresponding to the names listed in the text. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is the most prominent and appears to be 'Prof. DR. Moch. Isnaeni'. The other three signatures are less distinct but appear to be 'Lisman Iskandar', 'Hj. Moerdiati Subagyo', and 'Y. Sogar Simamora'.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan keberadaan dari bank campuran di Indonesia adalah sama dengan pengaturan keberadaan bank umum nasional, sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Hal tersebut ditegaskan didalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan kedudukan yang sama tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi bank umum di Indonesia, memberikan perlakuan yang sama terhadap bank campuran di Indonesia. Sehingga bank campuran di Indonesia harus tunduk pada segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan-peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia.
- b. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya. Di Indonesia sendiri, masalah hubungan antara bank dengan nasabah dalam peraturan perundang-undangan belum pernah dibahas secara tuntas sehingga perlindungan hukum antara bank dengan nasabah, khususnya nasabah bank campuran bersifat tindakan preventif. Tindakan preventif tersebut dapat berupa peraturan yang ditetapkan Bank

Indonesia mengenai syarat-syarat izin beroperasi, pencabutan izin sampai dengan tingkat kesehatan bank campuran tersebut. Namun demikian , pemerintah saat ini telah memberikan jaminan kepada nasabah bank campuran di Indonesia sehingga keberadaan bank campuran di Indonesia adalah sama kedudukannya dengan bank umum nasional.

2. Saran

- a. Pemerintah dapat memberikan perlakuan yang sama antara bank campuran dengan bank umum nasional, perlakuan yang sama tersebut dapat berupa hak dan kewajiban yang sama agar bank umum nasional di Indonesia nantinya telah siap dalam menghadapi era globalisasi. Dimana nantinya akan semakin banyak bank campuran yang beroperasi di Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dengan bank umum nasional. Sehingga dengan demikian , perbankan nasional Indonesia lebih siap dalam era perdagangan bebas dimana semua hal tergantung dari kemampuan dari masing-masing bank tersebut.
- b. Pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan jelas, misalnya dengan merealisasikan lembaga asuransi deposito yang saat sudah sangat mendesak keberadaannya agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional kembali pulih seperti semula. Karena dengan adanya lembaga asuransi deposito, nasabah bank akan merasa mempunyai perlindungan hukum yang pasti atas dana yang disimpan pada bank. Dan mengingat semakin banyaknya bank campuran yang beroperasi di Indonesia, perbankan nasional akan terancam

keberadaannya apabila tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi nasabahnya .